

# **Kebijakan Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2021 dan Penjabarannya di Daerah**

**Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA**  
**Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan**  
**Kementerian PPN/Bappenas**

**Disampaikan pada:**  
**Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2020**  
**Bandung, 9 Maret 2020**



# OUTLINE

**1**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  
(RPJMN) 2020-2024

**2**

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

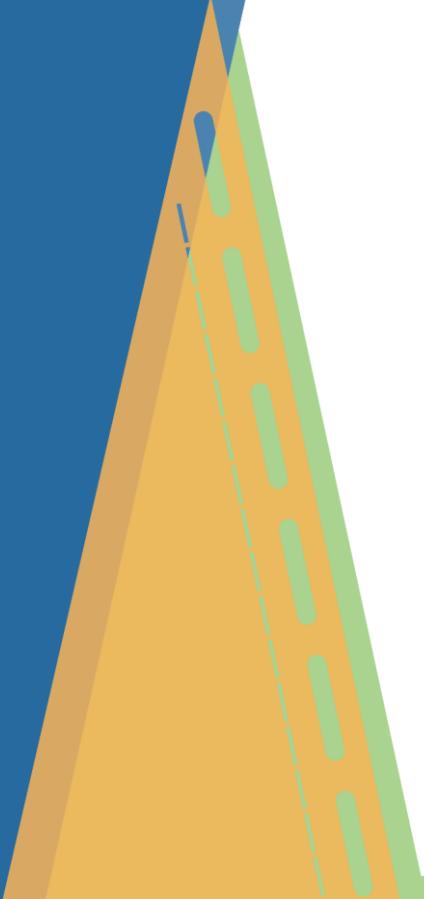
**3**

Kebijakan Dana Transfer 2020-2024

**4**

Highlight Pelaksanaan Rakortekrenbang 2020  
Wilayah Timur

# 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024



# 7 AGENDA PEMBANGUNAN DAN LANGKAH KONKRET PENCAPAIANNYA

## 7 AGENDA PEMBANGUNAN



1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

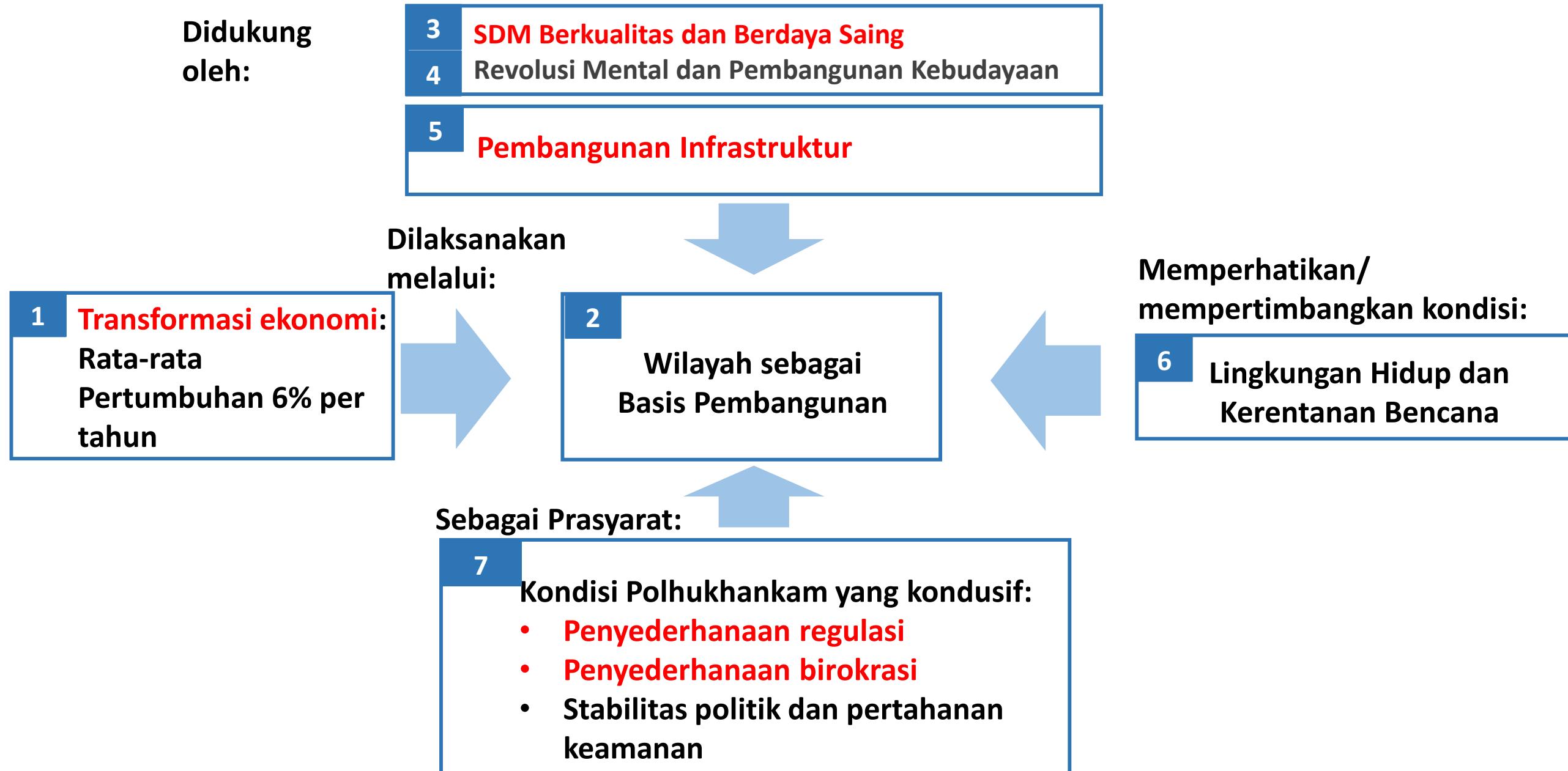
**UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN JANGKA MENENGAH, RPJMN 2020-2024 MEMUAT PROYEK DENGAN DAYA UNGKIT TINGGI.**

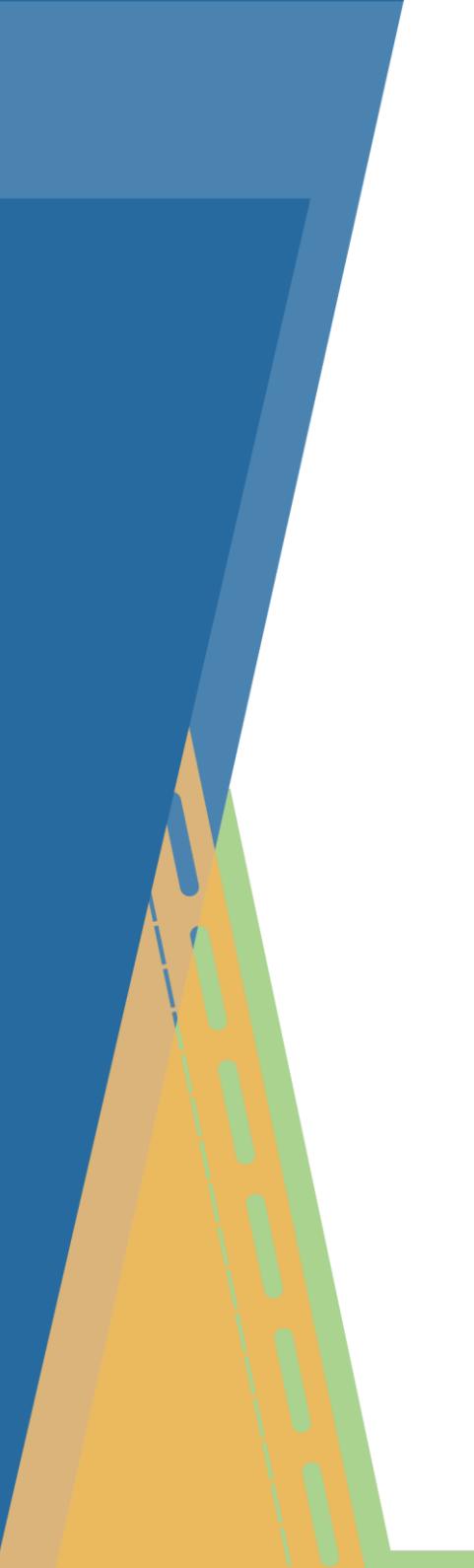
**41 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT), antara lain:**

- 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : **Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai**
- **Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung**
- **Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting**



# KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN





## **7 AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024**

# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 1



# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 2



## Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

4. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 3



# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 4



# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 5



# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 6



# AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL) 7

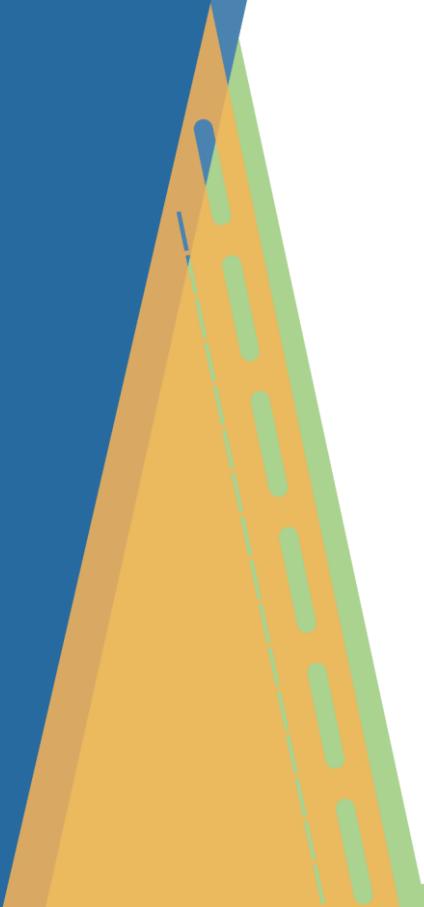


# 2 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2021

---

---

---





# KONDISI SAATINI: LINGKUNGAN EKSTERNAL

***Munculnya kasus penyebaran virus corona menambah risiko ketidakpastian perekonomian global 2020 yang masih menghadapi isu geo-ekonomi-politik***



## Brexit

Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa per 31 Januari 2020, namun masih akan menjalani masa transisi 11 bulan untuk finalisasi kesepakatan dengan Uni Eropa.



## Novel Coronavirus

 **43.** Kasus

 **28** Negara

Novel Coronavirus (2019-nCoV) merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China.

Wabah coronavirus **diprediksikan akan menekan perekonomian China** yang bisa **berdampak ke seluruh dunia** melalui *supply chain*, pariwisata dan harga komoditas.



## Perang Dagang AS-China

Meski terdapat sinyal positif dari kesepakatan fase I, beberapa permasalahan fundamental belum disentuh (ex: subsidi BUMN China dan transfer teknologi).

## TANTANGAN GLOBAL

Perang Dagang AS-RRT

Virus COVID -19 (Coronavirus Disease 19)

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi RRT

## PERKIRAAN DAMPAK BAGI DAERAH

Daerah-daerah Pariwisata, Industri, Perkebunan, Perikanan dan Perdagangan

Jangka Pendek (1-6 bulan):

1. Menurunnya kunjungan wisatawan
2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
3. Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan
4. Menurunnya arus perdagangan
5. Meningkatnya inflasi

Jangka Menengah (7-12 bulan):

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan
5. Meningkatnya kredit macet

## LANGKAH ANTISIPASI

- Rapat Terbatas **Kesiapan Menghadapi Virus Corona**, Selasa (4/2/2020)
- Sidang Kabinet Paripurna **Antisipasi Dampak Perekonomian Global**, Selasa, 11/2/2020
- Rapat Terbatas **Ketersediaan Bahan Baku Bagi Industri Besi dan Baja**, Rabu (12/2/2020)
- Rapat Terbatas **Akselerasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha**, Rabu (12/2/2020)

Kebijakan Fiskal 2020:

- Percepatan pencairan anggaran
- Pindahkan kegiatan di daerah terkena dampak

**RKP dan Kebijakan Fiskal 2021:**

- **Kebijakan *counter cyclical* bagi daerah-daerah terkena dampak**

# DAERAH-DAERAH YANG BERISIKO TERDAMPAK (1/2)

1. Provinsi penghasil minyak:
  - Jawa Timur (Bojonegoro), **Jawa Tengah (Cepu, Blora), Riau (Rokan)**, Kalimantan Timur, **Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jambi**
2. Provinsi penghasil gas:
  - Papua Barat (Teluk Bintuni), Kalimantan Timur (Blok Mahakam), **Sumatera Selatan (Musi Banyuasin), Kepulauan Riau (Natuna), Jawa Barat**
3. Provinsi penghasil karet:
  - **Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, Jambi**, Kalimantan Barat (7,6%), dan sisanya tersebar di Kalimantan Selatan, **Lampung**, Kalimantan Tengah, **Sumatera Barat, dan Bengkulu**
4. Provinsi penghasil sawit: **Riau, Sumatera Utara**, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, **Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi**
5. Provinsi penghasil ikan/udang/hasil laut: **Jawa Tengah**, Jawa Timur, **Riau, Kepulauan Riau**, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, **Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan**
6. Provinsi tujuan wisata:
  - Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang relatif besar: **Bali (23,3 persen), DI Yogyakarta (10,2 persen)**, Jawa Timur (5,8 persen), **DKI Jakarta (4,8 persen) dan Jawa Tengah (3,1 persen)**
  - Provinsi-provinsi dengan share PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman setidaknya 2 persen: **Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sumatera Utara**

# DAERAH-DAERAH YANG BERISIKO TERDAMPAK (2/2)

7. Provinsi basis industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki: :
  - **Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten**
8. Provinsi basis industri elektronik:
  - **Jawa Barat, Kepulauan Riau (Batam), DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah**
9. Provinsi basis industri otomotif & komponen: :
  - **Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau**
10. Provinsi basis industri logam dasar:
  - **Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta**
11. Provinsi basis industri makanan & minuman:
  - Jawa Timur, **Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta**



## SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**



## TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021

**Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah  
Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas**

# TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2021

## SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHAP KE-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJPN No.17/2007)



Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**

### TEMA PEMBANGUNAN RKP 2021



**Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas**

### PRIORITAS NASIONAL (PN) RKP 2021 = AGENDA PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2020-2024 (SEBAGAIMANA PERPRES NO.18/2020)

Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

**PN 1**

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

**PN 2**

SDM berkualitas dan berdaya saing

**PN 3**

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

**PN 4**

Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

**PN 5**

Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

**PN 6**

Stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik

**PN 7**

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA (1/3)

## Sasaran Pembangunan

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisa si 2018	Realisa si 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,61	4,15	4,00	4,70	5,20	5,60	5,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,97		13,34	13,00	12,35	11,71	11,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,36		6,20	6,00	5,90	5,50	5,20
Sumatera Utara	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,22	5,50	6,40	6,90	7,40	8,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,22		8,43	8,00	7,45	7,02	6,33
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,56		5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Sumatera Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	5,05	5,00	5,50	5,80	6,00	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,65		5,94	5,46	5,13	4,65	4,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,55		5,50	5,30	5,20	4,70	4,40
Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,84	3,70	4,30	4,60	4,90	5,40
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,39		6,75	6,55	6,15	5,65	5,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,20		6,00	5,80	5,70	5,20	4,90
Jambi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,71	4,40	4,70	5,40	6,00	6,40	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,92		7,29	7,00	6,45	6,05	5,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86		3,70	3,50	3,40	2,90	2,60
Sumatera Selatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,04	5,71	6,00	6,70	7,00	7,30	7,50
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,8		11,65	11,30	10,45	10,05	9,38
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,23		4,00	3,80	3,60	3,20	2,90
Bengkulu	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	4,96	5,10	5,70	6,00	6,20	6,30
	Tingkat Kemiskinan (%)	15,43		13,40	13,00	12,25	10,95	10,09
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,51		3,50	3,30	3,10	2,70	2,30
Lampung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,27	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	13,14		11,56	11,27	10,35	9,68	8,41
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,06		3,80	3,60	3,40	3,00	2,70
Kepulauan Bangka Belitung	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,45	3,32			5,10	5,50	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,25	9	4,40	4,16	3,85	3,48	3,24
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,65		3,30	3,10	3,00	2,50	2,20
Kepulauan Riau	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56	4,89	4,70	5,80	6,40	6,80	7,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20		5,30	5,00	4,64	4,35	3,89
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,12		6,90	6,70	6,50	6,10	5,80

## Kebutuhan Investasi

Provinsi	Keb. Investasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	Rp Triliun	66,28	64,12	82,90	89,39	97,16	105,84	121,49
Sumatera Utara	Rp Triliun	224,16	242,90	269,70	296,68	329,17	366,63	431,45
Sumatera Barat	Rp Triliun	66,47	70,89	83,41	90,60	99,22	109,70	122,24
Riau	Rp Triliun	201,26	226,57	242,31	262,79	292,28	318,99	359,70
Jambi	Rp Triliun	41,74	42,92	49,77	54,30	60,12	66,78	75,64
Sumatera Selatan	Rp Triliun	173,16	177,13	199,90	220,02	244,14	271,15	309,00
Bengkulu	Rp Triliun	26,06	28,54	31,81	34,75	38,80	42,92	48,31
Lampung	Rp Triliun	100,48	109,49	120,71	131,84	147,70	164,12	186,17
Kepulauan Bangka Belitung	Rp Triliun	15,98	15,51	19,30	20,96	23,24	25,71	28,52
Kepulauan Riau	Rp Triliun	92,77	99,21	110,37	120,47	135,45	151,95	171,03

Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing.
- Pelaksanaan kegiatan seminar dan rapat untuk menarik wisatawan nusantara.

Prioritas Tahun 2021

- Percepatan pengembangan kawasan perdesaan, dan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.

## Keterangan:

Relatif aman dari dampak virus Corona

Terdampak oleh virus Corona

Terdampak parah oleh virus Corona

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA (2/3)

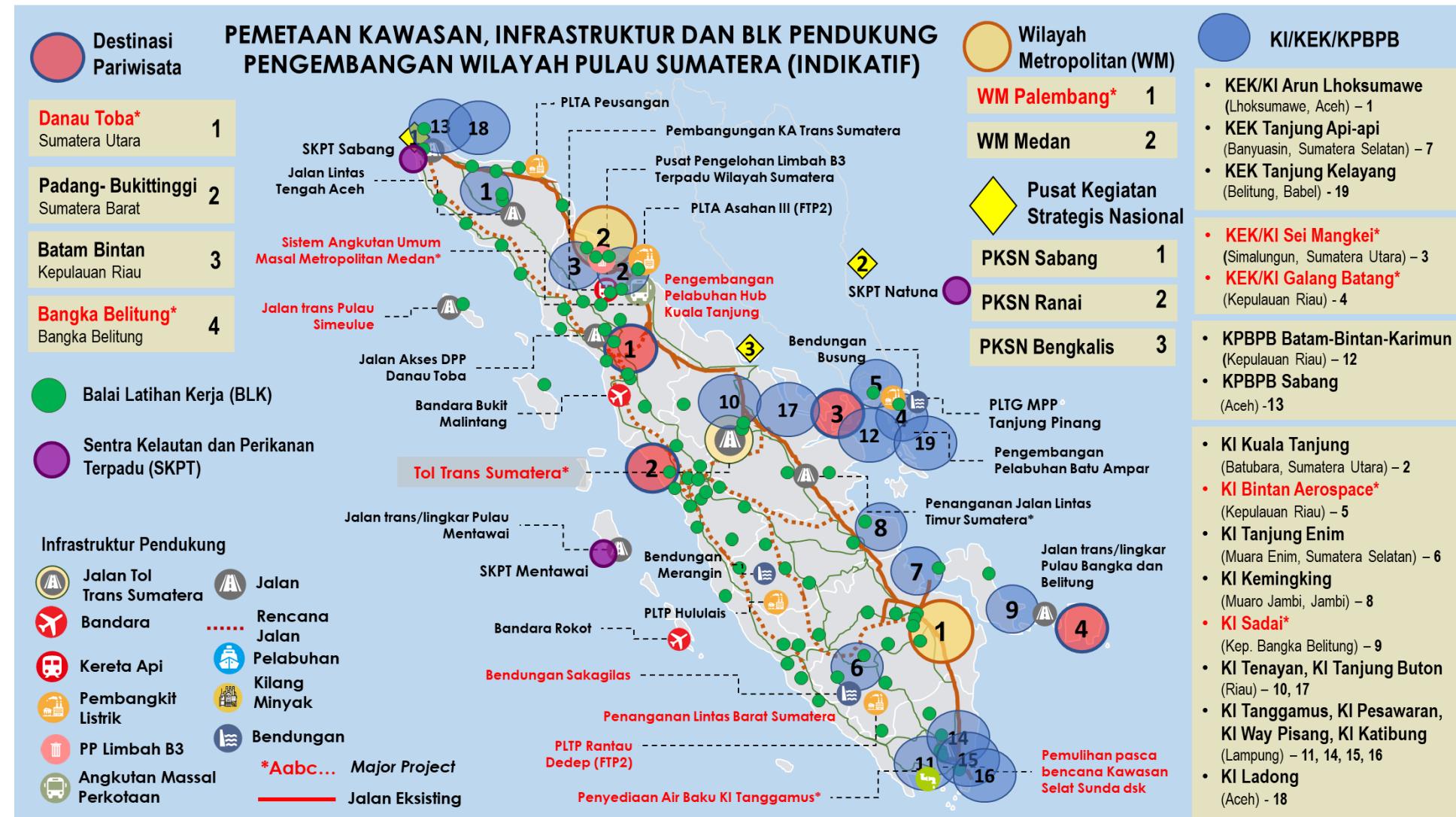
## Sasaran Pembangunan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
<b>Koridor Pertumbuhan</b>					
Aceh	1	Kota Sabang*	Jambi	1	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	2	Kota Banda Aceh*		2	Kabupaten Muaro Jambi
	3	Kabupaten Aceh Besar		3	Kota Jambi*
	4	Kabupaten Pidie		1	Kabupaten Musi Banyuasin
	5	Kabupaten Pidie Jaya		2	Kabupaten Banyuasin
	6	Kabupaten Bireuen		3	Kota Palembang
	7	Kota Lhoksumawe*		4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	8	Kabupaten Aceh Utara		5	Kabupaten Ogan Hilir
	9	Kabupaten Aceh Timur		6	Kabupaten Muara Enim
	10	Kota Langsa*		7	Kota Prabumulih*
	11	Kabupaten Aceh Tamiang		8	Kabupaten Empat Lawang
Sumatera Utara	1	Kabupaten Langkat	Bengkulu	9	Kabupaten Lahat
	2	Kota Binjai		10	Kabupaten Musi Rawas
	3	Kota Medan		11	Kota Lubuk Linggau*
	4	Kabupaten Deli Serdang		1	Kabupaten Rejang Lebong
	5	Kabupaten Karo		2	Kabupaten Kepahiang
	6	Kabupaten Serdang Bedagai		3	Kabupaten Bengkulu Tengah
	7	Kabupaten Batubara		4	Kota Bengkulu*
	8	Kabupaten Simalungun		1	Kabupaten Tulangbawang
	9	Kota Tanjung Balai		2	Kabupaten Lampung Tengah
	10	Kabupaten Asahan		3	Kota Metro
	11	Kabupaten Labuhan Batu Utara		4	Kabupaten Lampung Selatan
	12	Kabupaten Labuhan Batu		5	Kota Bandar Lampung*
	13	Kabupaten Labuhan Batu Selatan		6	Kabupaten Pesawaran
Sumatera Barat	1	Kabupaten Lima Puluh Koto	Bangka Belitung	7	Kabupaten Lampung Timur
	2	Kota Payakumbuh		1	Kabupaten Bangka Barat
	3	Kabupaten Agam		2	Kabupaten Bangka
	4	Kota Bukittinggi*		3	Kota Pangkal Pinang*
	5	Kota Padang Panjang	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Karimun
	6	Kabupaten Padang Pariaman		2	Kota Batam
	7	Kota Padang*		3	Kabupaten Bintan
	1	Kabupaten Rokan Hilir		4	Kota Tanjung Pinang*
Riau	2	Kota Dumai*			
	3	Kabupaten Bengkalis			
	4	Kabupaten Siak			
	5	Kota Pekanbaru*			
	6	Kabupaten Pelalawan			
	7	Kabupaten Indragiri Hulu			
	8	Kabupaten Kampar			

## Koridor Pembangunan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
<b>Koridor Pemerataan</b>					
Aceh	1	Kabupaten Aceh Tengah	Bengkulu	1	Kabupaten Mukomuko
	2	Kabupaten Aceh Barat		2	Kabupaten Bengkulu Utara
	3	Kabupaten Bener Meriah		3	Kabupaten Bengkulu Selatan
	4	Kabupaten Nagan Raya		4	Kabupaten Seluma
	5	Kabupaten Simeulue		5	Kabupaten Kaur
Sumatera Utara	1	Kota Pematang Siantar*	Lampung	1	Kabupaten Lampung Utara
	2	Kabupaten Samosir		2	Kabupaten Pringsewu
	3	Kabupaten Toba Samosir		3	Kabupaten Tanggamus
	4	Kabupaten Dairi		4	Kabupaten Lampung Barat
	5	Kabupaten Phakphak Barat		5	Kabupaten Pesisir Barat
Bengkulu	6	Kabupaten Hubang Hasundutan	Bangka Belitung	1	Kabupaten Bangka Tengah
	7	Kabupaten Tapanuli Utara		2	Kabupaten Bangka Selatan
	8	Kabupaten Tapanuli Tengah		3	Kabupaten Belitung
	9	Kota Sibolga*		4	Kabupaten Belitung Timur
Kepulauan Riau	10	Kota Gunung Sitoli*	Kepulauan Riau	1	Kabupaten Kepulauan Anambas
	11	Kabupaten Nias		2	Kabupaten Natuna
	12	Kabupaten Nias Selatan		1	Kabupaten Tanah Datar
Sumatera Barat	13	Kabupaten Nias Barat	Sumatera Barat	2	Kabupaten Solok
	14	Kabupaten Nias Utara		3	Kota Solok*
	1	Kabupaten Serolangun		4	Kabupaten Pesisir Selatan
Jambi	2	Kabupaten Bungo		5	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	3	Kabupaten Batang Hari			
	4	Kabupaten Tebo			
	5	Kabupaten Merangin			
	6	Kabupaten Kerinci			
	7	Kota Sungai Penuh			
	8				

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA (3/3)



# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI (1/2)

## Sasaran Pembangunan

Provinsi	Indikator Pembangunan	Realisa si 2018	Realisa si 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,17	5,89	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Tingkat Kemiskinan (%)	3,57		3,18	2,85	2,65	2,35	2,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24		5,90	5,70	5,50	5,10	4,80
Jawa Barat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,64	5,07	5,40	5,50	5,70	5,90	6,00
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,45		6,31	6,07	5,70	5,24	4,75
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,17		7,70	7,50	7,40	7,00	6,70
Jawa Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,32	5,41	5,60	5,80	5,90	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	11,32		9,81	9,43	9,00	8,55	8,15
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,51		4,20	4,00	3,80	3,40	3,10
DI Yogyakarta	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,20	6,60	6,30	6,40	6,50	6,80	6,90
	Tingkat Kemiskinan (%)	12,13		9,11	8,86	8,25	7,81	7,25
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35		3,00	2,80	2,60	2,20	1,90
Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,52	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,98		10,08	9,71	9,29	8,65	8,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99		3,60	3,40	3,20	2,80	2,50
Banten	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	5,53	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80
	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24		4,80	4,50	4,00	3,65	3,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,52		8,00	7,80	7,70	7,30	7,00
Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,35	5,63	6,00	6,50	6,60	6,60	6,70
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,01		3,52	3,33	3,05	2,75	2,45
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,37		1,50	1,30	1,30	1,20	1,00

### Keterangan:

Relatif aman dari dampak virus Corona

Terdampak oleh virus Corona

Terdampak parah oleh virus Corona

## Kebutuhan Investasi

Provinsi	Keb. Investasi	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	Rp Triliun	1.085,47	1.179,27	1.311,96	1.437,12	1.579,67	1.735,42	1.910,97
Jawa Barat	Rp Triliun	497,02	527,29	588,95	642,36	701,87	786,74	869,23
Jawa Tengah	Rp Triliun	378,96	414,67	451,02	493,69	545,82	607,49	672,30
DI Yogyakarta	Rp Triliun	40,50	43,86	44,51	49,01	54,48	61,18	68,01
Jawa Timur	Rp Triliun	586,22	637,08	697,12	760,78	839,91	935,73	1.035,87
Banten	Rp Triliun	180,90	186,89	220,62	240,35	264,07	293,03	323,15
Bali	Rp Triliun	74,68	75,85	90,62	99,58	110,54	123,33	137,32

### Dalam semester 1 Tahun 2020

- Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, dan Bali diperkirakan akan merasakan dampak dari menurunnya kunjungan wisatawan asing dan perlambatan ekonomi dunia.
- Pengamanan terhadap pasokan bahan baku industri pengolahan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.

### Prioritas Tahun 2021

- Percepatan pengembangan kawasan perdesaan dan penguatan keterkaitan desa-kota.
- Percepatan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi.

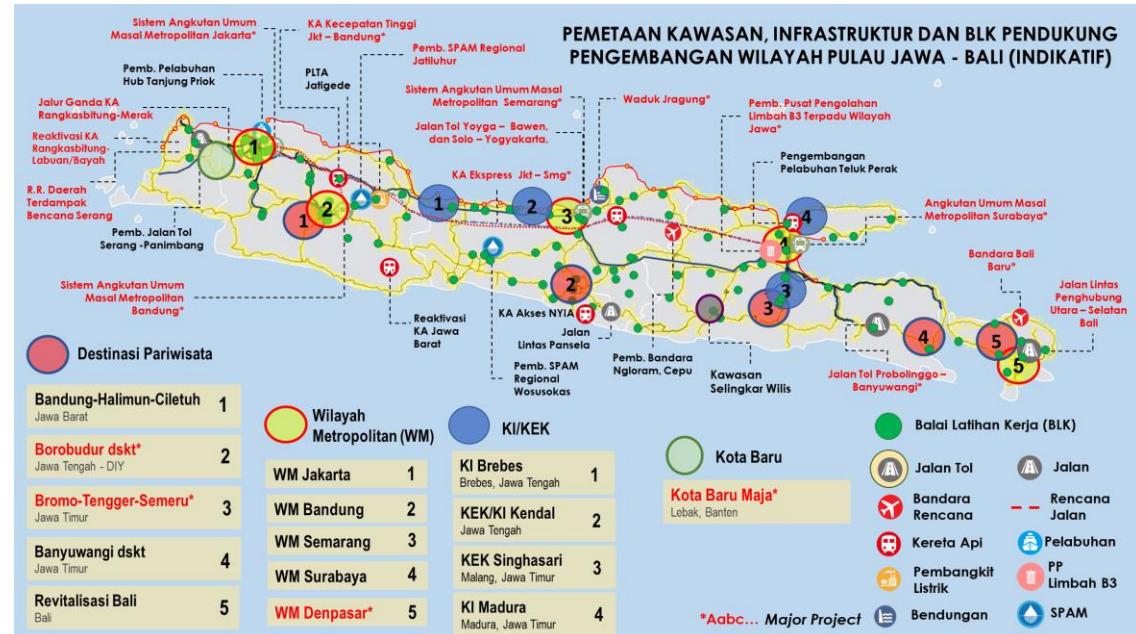
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI (2/2)

## Koridor Pembangunan

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
<b>Koridor Pertumbuhan</b>					
Banten	1	Kota Cilegon*	Jawa Tengah	1	Kabupaten Brebes
	2	Kabupaten Serang		2	Kota Tegal*
	3	Kota Serang*		3	Kabupaten Tegal
	4	Kabupaten Lebak		4	Kabupaten Pemalang
	5	Kabupaten Tangerang		5	Kabupaten Pekalongan
	6	Kota Tangerang		6	Kota Pekalongan*
	7	Kota Tangerang Selatan		7	Kabupaten Batang
DKI Jakarta	1	Kabupaten Kepulauan Seribu		8	Kabupaten Kendal
	2	Kota Jakarta Barat		9	Kota Semarang
	3	Kota Jakarta Pusat		10	Kabupaten Demak
	4	Kota Jakarta Selatan		11	Kabupaten Kudus
	5	Kota Jakarta Timur		12	Kabupaten Pati
	6	Kota Jakarta Utara		13	Kabupaten Rembang
Jawa Barat	1	Kota Depok		14	Kabupaten Semarang
	2	Kabupaten Bogor		15	Kabupaten Grobogan
	3	Kota Bogor		16	Kota Salatiga
	4	Kota Bekasi		17	Kabupaten Boyolali
	5	Kabupaten Bekasi		18	Kabupaten Sukoharjo
	6	Kabupaten Karawang		19	Kota Surakarta*
	7	Kabupaten Purwakarta		1	Kabupaten Tuban
	8	Kabupaten Bandung Barat		2	Kabupaten Lamongan
	9	Kota Cimahi		3	Kabupaten Gresik
	10	Kota Bandung		4	Kota Surabaya
	11	Kabupaten Sumedang		5	Kabupaten Sidoarjo
	12	Kabupaten Majalengka		6	Kabupaten Mojokerto
	13	Kabupaten Cirebon		7	Kota Mojokerto
Bali	1	Kabupaten Tabanan		8	Kabupaten Bangkalan
	2	Kabupaten Badung		9	Kabupaten Pasuruan
	3	Kota Denpasar		10	Kota Pasuruan*
	4	Kabupaten Gianyar		11	Kabupaten Probolinggo
	5	Kabupaten Klungkung		12	Kota Probolinggo*
	14	Kabupaten Banyuwangi		13	Kabupaten Situbondo
	15	Kabupaten Malang		14	Kabupaten Banyuwangi
	16	Kota Malang*		15	Kabupaten Malang
	17	Kota Batu*		16	Kota Malang*
	17	Kota Batu*		17	Kota Batu*

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
<b>Koridor Pemerataan</b>					
Jawa Barat	1	Kabupaten Pandeglang	Jawa Timur	1	Kabupaten Sleman
	1	Kabupaten Bandung		2	Kota Yogyakarta*
	2	Kabupaten Garut		3	Kabupaten Bantul
	3	Kabupaten Tasikmalaya		1	Kabupaten Kediri
	4	Kota Tasikmalaya		2	Kota Kediri*
	5	Kabupaten Ciamis		3	Kabupaten Bondowoso
	6	Kota Banjar		4	Kabupaten Lumajang
	7	Kabupaten Kuningan		5	Kabupaten Jember
	8	Kabupaten Sukabumi		6	Kabupaten Pamekasan
	9	Kota Sukabumi*		7	Kabupaten Sumenep
Jawa Tengah	10	Kabupaten Pangandaran	Bali	1	Kabupaten Buleleng
	1	Kabupaten Cilacap		1	Kabupaten Sleman
	2	Kabupaten Banyumas		2	Kota Yogyakarta*
	3	Kabupaten Kebumen		3	Kabupaten Bantul
	4	Kabupaten Magelang		1	Kabupaten Kediri
	5	Kota Magelang*		2	Kota Kediri*
	6	Kabupaten Klaten		3	Kabupaten Bondowoso

## Prioritas Pembangunan



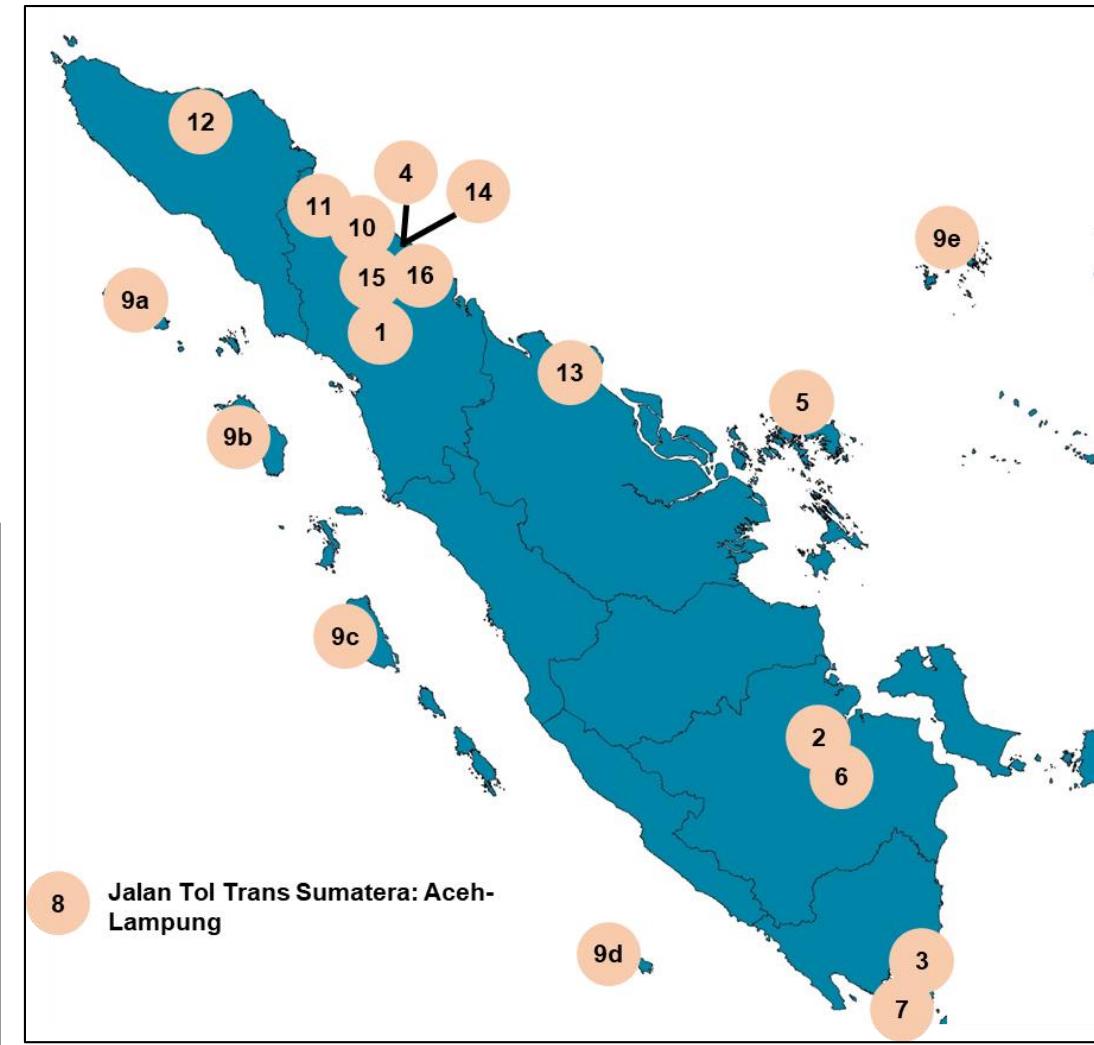
# PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH SUMATERA

## Tahun 2021

1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan
  - a. Perintisan Destinasi Pariwisata Batam – Bintan
  - b. Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim
  - c. Pengembangan kawasan Bintan Resort
2. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang
  - a. Jalan Tol Trans Sumatera
  - b. Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan berbasis jalan
  - c. SPALD-T Skala Kota/Regional, SPALD-T Skala Permukiman, SPALD-S Skala Kota (IPLT), TPA, TPST, TPS3R

### Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba;
- 2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan;
- 3) Revitalisasi Tambak di Lampung;
- 4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional;
- 5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan;
- 6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang;
- 7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
- 8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung;
- 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna;
- 10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan;
- 11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara;
- 12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto;
- 13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai;
- 14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung;
- 15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan
- 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara.



# PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) DI WILAYAH JAWA-BALI

## Tahun 2021

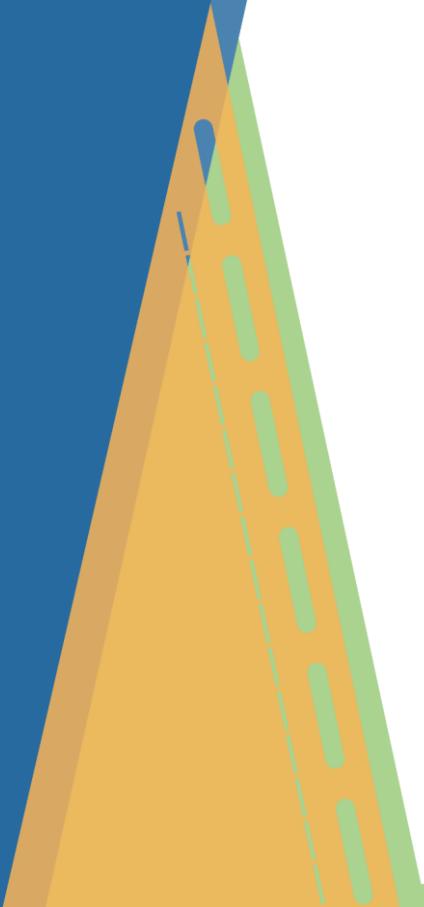
1. Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar
  - a. Pembangunan Bandara Bali Baru
  - b. Pengembangan Bandara Ngurah Rai
  - c. Pengembangan Pelabuhan Sanur
  - d. Pengembangan Angkutan umum massal perkotaan Denpasar berbasis jalan
2. Pembangunan Kota Baru Maja
  - a. Jalan Tol Jabodetabek
  - b. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R
  - c. Be Creative District
3. Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak
  - a. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang sosial ekonomi (BNPB)
  - b. Layanan pendampingan pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (BNPB)
  - c. Sekolah yang mendapatkan bantuan Bencana Alam/Sosial (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



### Keterangan Peta Major Project seluruh PN:

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur Dskt, (b) Bromo-Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali;
- 2) Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa;
- 3) Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas);
- 4) Pengembangan Wilayah Metropolitan Denpasar;
- 5) Pembangunan Kota Baru Maja;
- 6) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda;
- 7) Penangangan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa;
- 8) Pembangunan KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung);
- 9) Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban;
- 10) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: (a) Tanjung Priok dan (b) Tanjung Perak;
- 11) Pembangunan Waduk Multiguna Purworejo;
- 12) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya;
- 13) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur;
- 14) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis: Citarum; dan
- 15) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur.

# 3 KEBIJAKAN DANA TRANSFER 2020-2024



# EVALUASI PERENCANAAN DAK

## 1) Penetapan Kebijakan

- Beberapa bidang memiliki menu dan rincian kegiatan **semakin banyak** (sebagai contoh di bidang kesehatan, KKP, dll )
- Perbedaan antara jenis DAK (reguler, afirmasi, dan penugasan) **belum konsisten** antar Bidang DAK (apakah membedakan menu kegiatan atau hanya lokasi prioritas)
- Levelling/Struktur antar bidang belum konsisten (contoh antara bidang jalan yang umum dan bidang kesehatan yang sangat rinci)



## 2) Pengusulan

- Beberapa KL membuat **pengusulan melalui aplikasi Internal** sebelum pengusulan melalui Krisna-DAK, sehingga membingungkan daerah
- **Penetapan bidang/sub-bidang tergantung dari diskresi pemerintah pusat dan bersifat sektoral** (ada menu kegiatan baru di tengah periode pengusulan, inkonsistensi dalam perencanaan bidang/subbidang, belum memiliki pendekatan wilayah/lintas sektor)
- **Kualitas usulan yang beragam** (Pemerintah daerah kurang melakukan seleksi prioritas usulan, Kelengkapan data dan informasi yg sering terbatas, terbatasnya SDM di proses verifikasi pusat dan di daerah)

## 3) Verifikasi, Penilaian & Sinkronisasi



- Hasil verifikasi oleh Kemendagri belum sepenuhnya menjadi acuan dalam memberikan penilaian Pusat
- Masih rendahnya kapasitas verifikator Pusat dan Daerah, terutama terkait dengan hal-hal teknis

## 4) Penetapan Alokasi dan RK

- Penetapan alokasi **belum sepenuhnya merefleksikan** besaran yang diusulkan per bidang dan per daerahnya
- RK berlangsung hingga melewati batas **penetapan APBD**



## 5) Pelaksanaan Kegiatan

- Juknis oleh KL Pengampu **mengatur terlalu detail/rigid** sehingga menyulitkan penyerapan Alokasi DAK Fisik
- Jukops oleh KL pengampu terbit terlambat
- Penetapan final RK **belum menjamin kegiatan dapat dilaksanakan (diserap)** akibat kendala di lapangan seperti misalnya **tumpang tindih** lokasi kegiatan atau ketidaksiapan OPD dalam **pengadaan barang**



## 6) Evaluasi dan Pemantauan

- **Data dan Informasi** pencapaian target-target bidang DAK 2015-2019 **masih terbatas dan belum optimal**
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi di masing-masing K/L Pengampu **belum ter-standar dan terintegrasi**
- Belum ada **sekretariat bersama** yang bertanggungjawab untuk **pengelolaan data dan informasi pencapaian target DAK**. Upaya utk saling tukar informasi antar stakeholder masih terbatas

# POKOK-POKOK KEBIJAKAN DTK/DAK 2020-2024

01

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

02

Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, & pencapaian tujuan pembangunan global; serta mendorong tindakan afirmatif bagi daerah.

03

Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK.

04

Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK.

05

Mendorong daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur.

06

Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK.

07

Meningkatkan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel.

**Skema reguler** yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi.

**Skema penugasan** yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahannya.

**Skema afirmasi** bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan.

Sinkronisasi dan integrasi kegiatan yang didukung oleh **sumber pendanaan lainnya**: belanja K/L, APBD, KPBUD dan swasta.

Memperhitungkan: (1) **satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan**; (2) **realisasi** tahun sebelumnya; (3) keterkaitan alokasi dan kinerja dengan **insentif (reward)**; serta (4) penerapan **disinsentif** bagi daerah yang melakukan pertukaran DTK dgn APBD.

Alokasi **hibah berbasis output** (*output based transfer*) secara selektif.

Mengembangkan: (1) **data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website**, (2) **pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah**, (3) **pengendalian penyaluran berbasis kinerja**, & (4) **pelaporan secara rutin**.

Memperkuat **peran APIP** di daerah (*pre-audit* dan *post-audit*)

# DAK FISIK

## Kata Kunci (Key Word)

### DAK Fisik Reguler

Orientasi  
Pelayanan  
Dasar

*Proposal and  
Formula  
Based*

Continue

Seluruh  
Daerah

Pemenuhan **sarana** dan **prasarana dasar** (pelayanan publik dasar) di seluruh daerah yang mendukung pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dan **Sustainable Development Goals (SDGs)**

### DAK Fisik Penugasan

Prioritas  
Nasional

Isu  
Lintas  
Sektor

Tentatif  
Per Tahun

Tematik

Kewilayahannya

Dukungan pencapaian **prioritas nasional** dalam penyelesaian **isu-isu nasional** lainnya, serta **arahan presiden** termasuk **isu lintas sektor** serta **isu kewilayahannya**.

### DAK Fisik Afirmasi

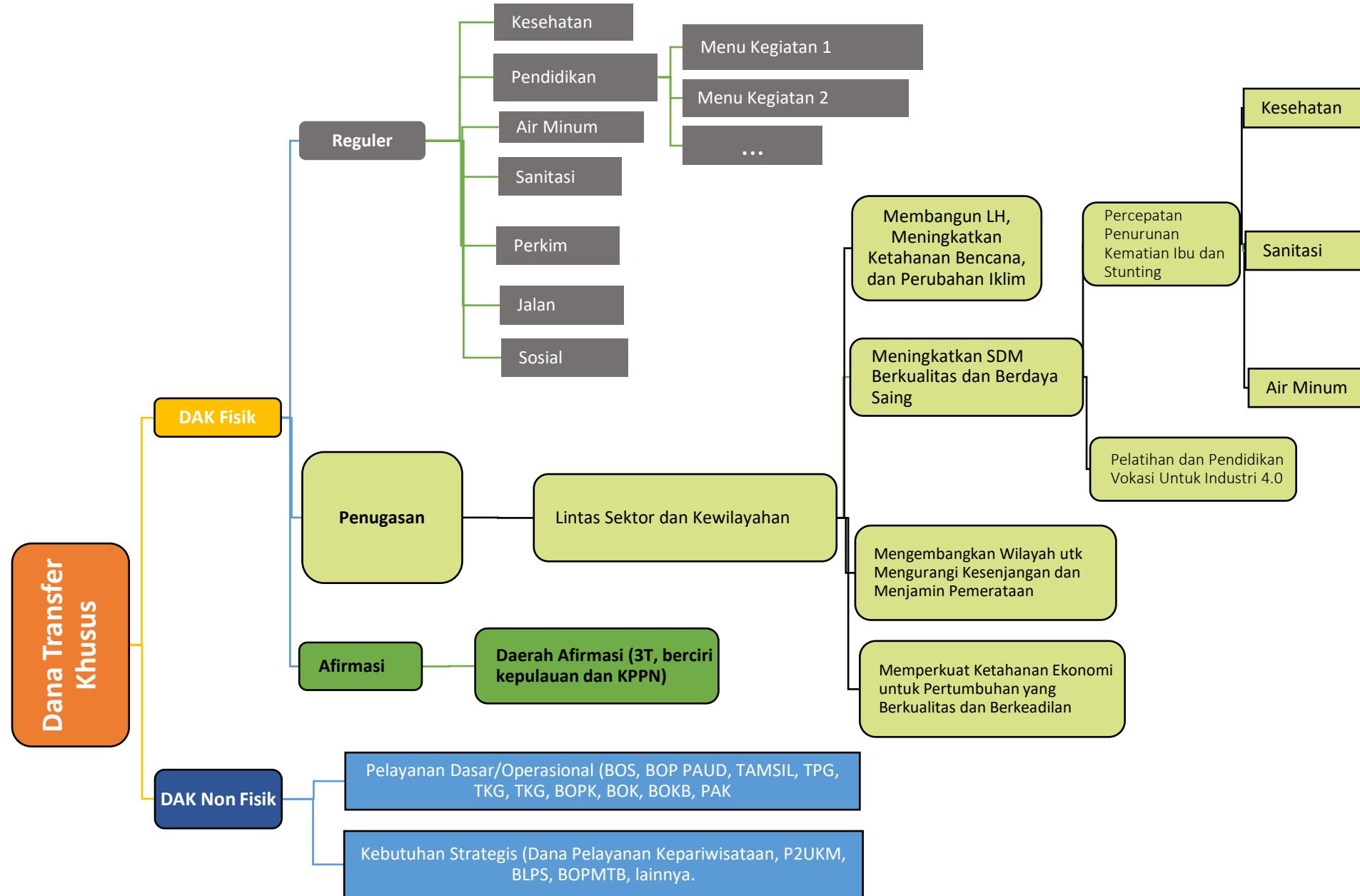
Daerah  
Afirmasi

pengalokasian  
bersifat tetap

Spesifik

DAK ini ditujukan untuk mendorong **percepatan pembangunan di kawasan tertentu**, daerah berciri kepulauan dan daerah afirmasi (daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan transmigrasi)

# STRUKTUR DAK 2020-2024



# RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK REGULER DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

## DAK Fisik Reguler Mendukung Pelayanan Publik Mendasar



Pendidikan



Sanitasi



Air Minum



Kesehatan



Jalan



Perumahan &  
Permukiman



Sosial

### A. Bersifat lanjutan (Bidang tetap dalam 5 Tahun)

Waktu penyelesaian dari DAK ini bersifat lanjutan (*continue*) dan belum dapat ditentukan target akhirnya.

### B. Pengalokasian Bersifat Pemerataan

Dalam hal ini seluruh daerah dapat mengusulkan sesuai dengan kebutuhan (*proposal based*).

### C. Pengusulan bersifat *Bottom Up*

- Pemerintah daerah mengusulkan atau menyampaikan proposal (*proposal based*) melalui sistem informasi berbasis web mengacu kepada prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah
- Pemerintah pusat melakukan penilaian dan pengalokasian berdasarkan formula tertentu (*formula based*)

# RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK PENUGASAN DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024

## PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan



### Major Project:

- Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
- Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
- Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
- Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas
- 10 Destinasi Pariwisata Unggulan

## PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



### Major Project:

- Pusat Kegiatan Strategis Nasional
- Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)

## PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing



### Major Project:

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Industri 4.0

## PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



### Major Project:

- Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

### A. Memiliki Waktu Penyelesaian

Waktu dan target penyelesaian jenis DAK ini ditentukan secara jelas

### B. Pengalokasian dan Bidang Bersifat dinamis

Menyesuaikan ketersediaan resource envelope, arahan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN berbasis kewilayahannya (*regional approach*).

### C. Pengusulan bersifat *Top Down*

- Pemerintah pusat menentukan kebijakan hingga fokus dan lokusnya
- Pemerintah daerah mengkonfirmasi kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat.

# RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN BIDANG DAK FISIK AFIRMASI DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024



**Daerah Afirmasi** (daerah 3T , daerah berciri kepulauan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

**PN 2 KP 4: Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**PN 2 KP 5: Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi**

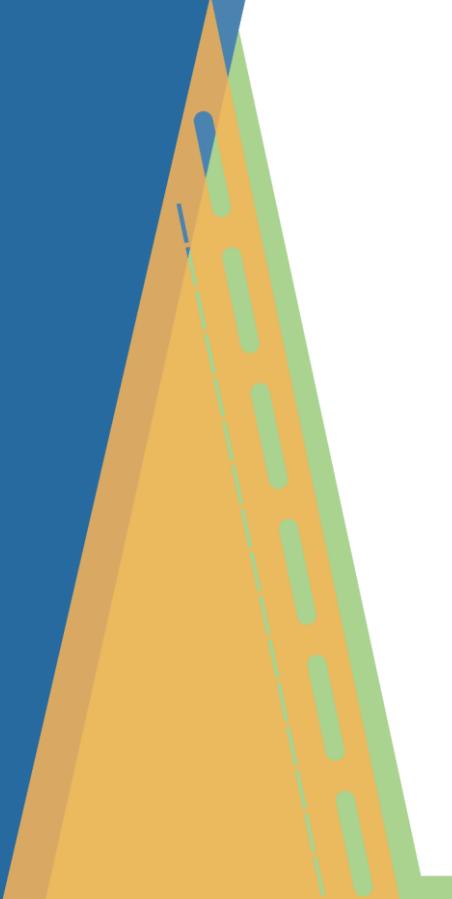
**A. Memiliki Waktu Penyelesaian**  
Waktu dan target penyelesaian jenis DAK ini ditentukan secara jelas

**B. Pengalokasian dan Bidang bersifat Dinamis**  
Ditujukan untuk menyelesaikan isu pemerataan pembangunan di seluruh daerah afirmasi (tertinggal, terdepan, terluar, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kepulauan, serta Papua) sesuai dengan target pembangunan.

**C. Pengusulan bersifat Top Down dan Bottom Up**

- Pemerintah pusat menentukan kebijakan hingga fokus dan lokusnya
- Pemerintah daerah mengusulkan kegiatan yang telah dirancang oleh Pusat.

# 4 **HIGHLIGHT PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG 2020 WILAYAH TIMUR**



# HIGHLIGHT PELAKSANAAN RAKORTEKRENBANG 2020

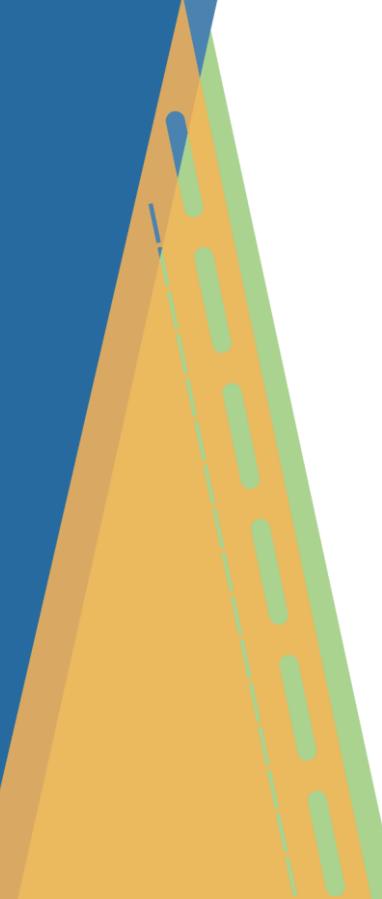
## WILAYAH TIMUR

- 

Perlunya konsistensi antara usulan Gubernur dan usulan yang masuk ke dalam sistem aplikasi Rakortek.
- 

Pentingnya peran Pemerintah Provinsi untuk menyaring usulan sesuai kewenangannya. Usulan yang merupakan kewenangan daerah dapat diusulkan melalui mekanisme DAK.
- 

Pemerintah Daerah untuk memperhatikan panduan dan jadwal pelaksanaan Rakortekrenbang 2020.



# TERIMA KASIH